

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Melihat kenyataan saat ini dimana perkembangan lembaga keuangan, terutama lembaga perbankan banyak mengalami kemunduran, banyak bank-bank yang dilikuidasi bahkan ada yang harus dimerger. Hal ini akibat dari adanya krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia sehingga mengakibatkan ambruknya perekonomian nasional, tidak terkecuali sektor perbankan.

Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengurus perbankan serta sebagai penentu kebijakan moneter atau *monetary policy authority* menempuh berbagai upaya demi menyelamatkan sektor perbankan dari kehancuran, yakni dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya kebijaksanaan deregulasi 1 Juni 1983 dan sebagai kelanjutan pemerintah menempuh berbagai kebijakan di bidang moneter, keuangan dan perbankan.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah Undang-Undang baru, yaitu UU No. 23 / 1999 tentang BI, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan BI sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

(www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_bi/)

Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugasnya ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

(www.bi.go.id/bank_indonesia2/utama/tentang_bi/tugas_bi/)

Dalam rangka mendorong pemerataan penyaluran kredit, lembaga keuangan perbankan harus berperan aktif mengingat tugas-tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dimana penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank.

Sementara itu penggunaan dana untuk penyaluran kredit bisa mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank yang lebih terpusat pada pendanaan penyaluran kredit daripada pendanaan yang lainnya. Oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan perkreditan yang berupa bunga. Terkonsentrasinya usaha lembaga perbankan dalam penyaluran kredit disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus ke unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan

kebijaksanaan moneter, lembaga perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur oleh pemerintah. Keempat, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral bank harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Baik itu kredit pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lain-lain.

Salah satu penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa pokok kebijaksanaan, yaitu melalui paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 tentang penyempurnaan sistem perkreditan yang pada dasarnya diarahkan untuk mengurangi secara bertahap peranan Likuiditas Bank Indonesia (LBI) dalam pemberian kredit.

Lembaga keuangan, terutama perbankan harus berperan aktif dalam pembangunan nasional mengingat tugas-tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan demikian kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan tetap diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan.

Banyaknya dana yang dihimpun oleh lembaga perbankan, maka mau tidak mau bank harus menyalurkan kembali kelebihan likuiditasnya untuk menghindari terjadinya "*idle funds*" (dana yang menganggur). Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank dimaksudkan agar

bank tidak menanggung beban bunga untuk dana-dana yang diperoleh dari masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah kredit yang disalurkan tergantung dari jumlah dana yang diperoleh dari masyarakat, dengan kata lain peningkatan jumlah dana yang dihimpun diikuti pula oleh peningkatan jumlah kredit yang disalurkan. Akan tetapi besar kecilnya permintaan akan kredit juga ditentukan oleh tingkat suku bunga kredit, jika tingkat suku bunga yang ditawarkan tinggi maka permintaan akan kredit sedikit, begitu juga sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah maka permintaan kredit bertambah. Akan tetapi pada kenyataannya, tinggi atau rendahnya tingkat suku bunga yang ditawarkan, permintaan kredit tetap bertambah.

Lembaga keuangan perbankan memegang peranan penting membantu penyediaan kredit dalam masyarakat, dimana bank bergerak dalam pengerahan dana, dan dana inilah yang digunakan oleh pihak bank untuk dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat, mengingat kredit sangat diperlukan dan merupakan salah satu sarana masyarakat untuk mendapatkan modal.

Usaha pemberian kredit kepada calon debitur dilakukan agar dana yang ada di bank dapat tersalurkan ke masyarakat sehingga dapat berkembang dan tercipta suatu pembangunan, dimana dapat terciptanya kegairahan bekerja sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Kebijaksanaan moneter paling penting dalam kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan, karena pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan kemajuan usaha para industrialisasi dan para pedagang. Disamping itu masyarakat tidak mungkin melepaskan diri dari lembaga perbankan, karena dengan berbagai fungsinya bank selalu dibutuhkan baik dalam pembentukan tabungan masyarakat maupun dalam penyaluran tabungan tersebut ke dalam investasi.

Pada dasarnya kebijaksanaan moneter bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat, yaitu:

- 1) Kebijakan moneter digunakan untuk menunjang usaha pemerataan pembangunan.
- 2) Kebijakan moneter digunakan untuk meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat.
- 3) Kebijakan moneter digunakan untuk memelihara kestabilan ekonomi.
- 4) Kebijakan moneter juga digunakan untuk menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga keuangan.

Salah satu pegangan yang paling penting dari kebijaksanaan moneter adalah bagaimana mengatur kebijaksanaan tingkat suku bunga kredit dan kebijaksanaan kredit. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa kebijaksanaan suku bunga bisa menunjang tercapainya sasaran kebijaksanaan moneter yang bisa mendorong tabungan masyarakat

sehingga akan mengurangi tekanan inflasi. Sedangkan di lain pihak kebijaksanaan suku bunga juga akan mendorong kegiatan produksi, terutama kegiatan produksi dan industri yang bisa banyak menyerap tenaga kerja serta dapat menggairahkan kegiatan usaha golongan ekonomi lemah, misalnya melalui penetapan tingkat suku bunga yang rendah yaitu kredit KIK, KMKP, Kredit Mini, dan sebagainya.

Di era pembangunan, lembaga keuangan perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Dan sebagai lembaga keuangan, bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan moneter pemerintah sebagaimana eratnyanya antara bank dan uang, sehingga pengaturan arus uang dari dan kepada masyarakat harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perusahaan, tidak terkecuali lembaga keuangan perbankan mempunyai tujuan yang telah digariskan dalam perusahaan. Dimana lembaga keuangan perbankan mempunyai tujuan untuk ikut berperan aktif dalam menopang perekonomian nasional yaitu melalui kegiatan perkreditan. Keadaan inilah yang

membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan ?
- 2) Sejauhmana pengaruh tingkat suku bunga kredit dan tingkat inflasi terhadap kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan ?
- 3) Faktor-faktor manakah dari tingkat suku bunga kredit dan tingkat inflasi yang paling berpengaruh dalam penyaluran kredit perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.
- 2) Mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat suku bunga kredit dan tingkat inflasi terhadap kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan.
- 3) Mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh dalam penyaluran kredit perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pertimbangan bagi lembaga perbankan didalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya di bidang perbankan khususnya masalah perkreditan.
- 2) Digunakan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian di bidang ini.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.